

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. 3. Raih Asa Sukses. Bogor.
- Ali Imron & Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. UNPAM PRESS Tangerang Selatan.
- Amir Ilyas. 2020. *Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*. Rajawali Pers. Depok.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Cet. 12. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1987. *Surat Dakwaan*. Cet. 1. Penerbit Alumni. Bandung.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Douglas N Walton. 2002. *Legal Argumentation And Evidence*. The Pennsylvania State University Press. United States Of America.
- E Utrecht. 1960. *Rangkaian Sari Kuliah Perdana Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas. Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. 05. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- . 2018. *Teori & Hukum Pembuktian*, Cet. 5. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gabriel Hallevy. 2010. *A Modern Treatise On The Principle Of Legality In Criminal Law*. Springer. Heidelberg.
- . 2012. *The Matrix Of Derrivate Criminal Liability*. Springer. Heidelberg.

- Ian Dennis. 2007. *The Law Evidence*. Ed. 3. Sweet and Maxwell. London.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KuhaP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. UNNES PRESS. Semarang.
- Leden Marpaung. 2019. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* Cet. 10. Sinar Grafika. Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan (dkk). 2016. *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Kemang. Jakarta.
- Mark Constanzo. 2006. *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Max M. Houck. 2009. *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*. An Imprint of Infobase Publishing. New York.
- Michael Cavadino & James Dignan. 1998. *The Penal System: An Introduction*, Ed. 2. Sage. London.
- Ministry of Justice. 2002. *The Court System in the Netherlands*. Administration of Justice Legal Assistance.
- Muhammad Nuruddin. 2019. *Ilmu Mantik Panduan Mudah & Lengkap Untuk Memahami Kaidah Berpikir*. Cet. 1. Keira. Depok.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya. Bandung.
- Murthada Muthahhari. 2017. *Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat Praktis*. Cet. 5. Rausyanfikir Institute. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 9. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. Cet. 5. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Richard A. Leo. 2008. *Police Interrogation and American Justice*. Harvard University Press. England.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. ELSAM dan HUMA. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Nusa Media. Bandung.

Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika. Jakarta.

Topo Santoso (dkk). 2006. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. PERLUDEM. Jakarta.

Jurnal

Adelline Syahda dan Adam Mulya Bunga Mayang. "Penangan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi: Varian Penerapan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Hasil Pilkada 2017". Jurnal Pemilu dan Demokrasi #10. Jakarta. Agustus 2017.

Elwi Danil. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi". JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. Vol. 01. No. 1. Edisi. Oktober 2020.

Juri Ardianto. "Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017". Jurnal Pemilu dan Demokrasi #10. Jakarta. Agustus 2017.

Paramita Ersan dan Anna Erliyana. "Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)". Pakuan Law Review Vol.VII Nomor 1. Januari-Juni 2018.

Internet

<http://perludem.org/2018/02/20/mewujud-damai-di-pilkada-oleh-titi-anggraini/>. diakses pada tanggal 25 Maret 2021. Pukul 00:22.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/19525661/sulawesi-selatan-teratas-dalam-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada>. diakses pada tanggal 25 Maret 2021. Pukul 00:37.

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/20120521/dua-paslon-pilkada-makassar-ditetapkan-tetapi-tidak-ada-kandidat-yang-hadir>. diakses pada tanggal 25 Maret 2021. Pukul 05:06.

<https://terkininews.com/2018/07/06/Langgar-Pasal-188-UU-No-10-tahun-2016-Bawaslu-Minta-Klarifikasi-Walikota-Makassar.html>. diakses pada tanggal 25 Maret 2021. Pukul 05:17

Surat Kabar

Eddy O.S. Hiariej. "Kinerja Polisi". Kompas. 6 November 2003.

Hasil Penelitian Dan Pengkajian

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Nomor. 476/Pid.Sus/2018/PN. Mks